

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Akuntansi

Menurut Hery (2019) akuntansi merupakan sebuah sistem informasi yang berisi tentang hasil kinerja, aktivitas ekonomi, serta kondisi keuangan perusahaan yang akan dilaporkan kepada para pengguna informasi akuntansi atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Akuntansi juga sering dianggap sebagai bahasa bisnis dimana informasi bisnis dikomunikasikan oleh *stakeholders* melalui laporan keuangan. Siregar (2019) menyimpulkan bahwa akuntansi sebagai sebuah informasi yang berguna untuk mengambil sebuah keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan dengan mengalami proses yang terdiri dari pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi.

Dalam kegiatannya akuntansi memiliki 3 rangkaian kegiatan asas yaitu kegiatan mengumpulkan data, kegiatan pencatatan dan kegiatan memberikan informasi perdagangan kepada pihak-pihak yang bersangkutan (Weygandt, Kimmel, and Kieso 2016). Berdasarkan definisi yang diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari pencatatan, pengklasifikasian serta pelaporan tentang segala transaksi keuangan perusahaan yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.2 Teknologi Informasi

Rachmadi (2020) mengungkapkan bahwa teknologi informasi merupakan salah satu teknologi yang digunakan dalam mengolah, memproses, menyusun, menyimpan serta mengubah data dengan menggunakan berbagai cara sehingga dapat menghasilkan informasi yang berguna dan berkualitas. Dengan adanya teknologi informasi yang semakin canggih perusahaan dapat beroperasi secara efisien dan efektif dibandingkan dengan pengelolaan secara manual.

Pengaplikasian teknologi informasi merupakan sebuah penerapan atau pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang tertentu. Pengaplikasian teknologi

informasi telah menciptakan dunia baru untuk mengelola serta mengatur sebuah bisnis Abdillah, *et al* (2020). Dalam penggunaannya teknologi informasi memiliki banyak keuntungan bagi para pebisnis baik yang baru merintis ataupun yang sudah beridiri bertahun-tahun. Adapun peran teknologi informasi menurut Kasemin (2016) yaitu:

1. Teknologi informasi berperan dalam meningkatkan Efektivitas dan efisien kinerja karena dengan adanya teknologi informasi berbasis komputer pada saat ini, akan lebih memudahkan perusahaan dalam mengelola kegiatannya.
2. Menghasilkan keunggulan strategis.
3. Dapat mengubah struktur organisasi dengan menyediakan informasi pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan waktu yang singkat sehingga memungkinkan untuk meningkatkan pengendalian dan pertanggungjawaban.
4. Menawarkan keunggulan kompetitif

2.1.3 Sistem Informasi Akuntansi

2.1.3.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi dapat dikatakan sebagai bagian terpenting dalam sebuah perusahaan, karena sistem informasi akuntansi dibutuhkan oleh manajemen perusahaan dalam memperoleh data-data keuangan perusahaan. Menurut Kurniawan (2020) sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem yang digunakan dalam memproses data dan transaksi-transaksi perusahaan untuk dijadikan sebuah informasi yang diperlukan perusahaan untuk merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan bisnis. Sistem informasi akuntansi akan memproses berbagai transaksi perusahaan baik transaksi keuangan maupun transaksi non keuangan yang secara langsung mempengaruhi laporan keuangan.

Sistem informasi akuntansi merupakan jaringan dari seluruh prosedur, formulir, catatan serta alat yang digunakan dalam mengolah data keuangan menjadi suatu laporan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil sebuah keputusan Marina, *et al* (2017). Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang digunakan perusahaan dalam mengumpulkan, menyimpan

serta mengolah data-data keuangan menjadi sebuah laporan atau informasi yang dapat digunakan dalam pihak-pihak dalam pengambilan keputusan.

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Lestari and Amri (2020) tujuan utama dari sistem informasi akuntansi adalah sebagai alat pengolah data yang berasal dari berbagai sumber yang nantinya akan dijadikan sebagai informasi akuntansi yang diperlukan oleh berbagai pihak dalam mengambil sebuah keputusan. Mardia, *et al* (2021) mengungkapkan bahwa ada beberapa tujuan sistem informasi akuntansi yaitu:

1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi
2. Memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan terkait perencanaan dan pengendalian perusahaan
3. Melakukan kontrol secara cepat dan tepat terhadap asset perusahaan
4. Efisiensi biaya dan waktu terhadap kinerja keuangan perusahaan
5. Menyajikan data keuangan yang sistematis dan akurat dalam periode akuntansi yang tepat.

Dari beberapa tujuan yang ada sistem informasi akuntansi sangat berperan penting karena dapat membantu perusahaan dalam mengelola keuangannya dengan baik. Sebagai salah satu bagian terpenting dalam perusahaan sistem informasi akuntansi memiliki berbagai peran dalam membantu perusahaan mencapai target dan tujuannya utamanya. Menurut Lestari and Amri (2020) peran sistem informasi akuntansi dibagi menjadi 3 yang saling berhubungan satu sama lain yaitu:

1. Mendukung aktivitas sehari-hari

Agar tetap dapat berjalan dengan eksis perusahaan harus tetap beroperasi dengan melakukan sejumlah aktivitas bisnisnya yang disebut sebagai transaksi. Transaksi dalam perusahaan terdiri dari berbagai macam misalnya: transaksi pembelian, transaksi penjualan, proses produksi maupun penyimpanan barang dagangan.

2. Mendukung proses pengambilan

Dalam peran ini sistem informasi akuntansi memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Sistem

informasi akuntansi merupakan informasi yang mendetail sehingga akan lebih memudahkan manajemen perusahaan dalam menelaah berbagai hal yang terjadi di perusahaan sebelum akhirnya mengambil sebuah keputusan. Keputusan yang akan diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan nantinya akan berkaitan dengan perencanaan serta pengendalian aktivitas perusahaan sehingga dalam hal ini sistem informasi akuntansi sangat amat dibutuhkan.

3. Membantu mengelola perusahaan dalam memenuhi tanggungjawabnya kepada pihak eksternal.

Setiap perusahaan pasti memiliki tanggungjawab yang harus dipenuhi secara hukum. Tanggungjawab yang harus dipenuhi perusahaan tidak hanya untuk pihak internal saja melainkan juga pihak-pihak eksternal perusahaan. Salah satu tanggungjawab penting perusahaan adalah memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berada diluar perusahaan atau *stakeholder* yang meliputi pemasok, pelanggan, pemegang saham, kreditor, pemerintah, investor serta publik. Sistem informasi akuntansi nantinya akan membantu mengelola perusahaan dalam mengumpulkan informasi yang akan diberikan kepada pihak-pihak diluar perusahaan.

Menurut Mardia, *et al* (2021) selain memiliki tujuan sistem informasi akuntansi juga memiliki manfaat bagi organisasi perusahaan yaitu:

1. Sistem informasi akuntansi bermanfaat untuk menyediakan dan menyajikan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga aktivitas utama perusahaan dalam berjalan dengan efektif dan efisien.
2. Sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan kualitas dan meminimalisir biaya produksi.
3. Dapat meningkatkan efisiensi kinerja bisnis diseluruh departemen yang saling terkait.
4. Dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam pengambilan keputusan.
5. Dapat meningkatkan *sharing knowledge*

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi sangat membantu manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan. Jika suatu perusahaan dapat menjalankan sistem informasi akuntansi dengan baik maka manfaat serta tujuan dari sistem informasi akuntansi akan dirasakan oleh

perusahaan secara langsung. Karena dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik perusahaan dapat melakukan proses operasi secara efektif dan efisien karena terdapatnya pengendalian dalam proses tersebut.

2.1.3.3 *Intergrated Financial Management Systems (IFMS)*

Menurut Dener (2017) *Intergrated Financial Management Systems* adalah serangkaian otomasi solusi secara terintegrasi yang dapat membantu pemerintah dalam merencanakan, mengeksekusi, dan memonitor anggaran serta mengawal dan melaporkan pendapatan dan pengeluaran negara. *Intergrated Financial Management Systems* dinilai sangat membantu efisiensi pengelolaan keuangan negara yang berdampak pada perampingan organisasi dan proses kegiatan.



Gambar 2.1 Aplikasi SAKTI Terintegrasi

Sumber: Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

2.1.4 Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan adalah suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan (Sadat 2020). Dalam pelaksanaannya akuntansi pemerintah memiliki pedoman yang disebut standar akuntansi pemerintah. Menurut Fauziah (2018) standar akuntansi pemerintah berisi prinsip-prinsip akuntansi pemerintah yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Selain itu, standar akuntansi pemerintah juga memiliki komite yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden dengan tujuan untuk

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah termasuk mendukung penerapan pelaksanaan standar tersebut.

Akuntansi pemerintah menyediakan laporan terkait dengan kepengurusan administrasi keuangan negara yang meliputi pengendalian serta pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Mulyani, *et al* (2018) mengungkapkan bahwa akuntansi pemerintahan memiliki 3 tujuan pokok yaitu:

1. Pertanggungjawaban

Fungsi pertanggungjawaban berarti akuntansi pemerintahan harus menyediakan informasi tentang berbagai kegiatan dan tindakan pemerintah selama periode bersangkutan;

2. Manajerial

Dalam hal manajerial pemerintahan tingkat menengah keatas dapat mengendalikan informasi keuangan untuk membuat keputusan atau menyusun perencanaan di masa yang akan datang;

3. Pengawasan

Berfungsi untuk memastikan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

2.1.5 Keuangan Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 1 dan 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Purnomo *et al* (2013) keuangan negara dapat ditinjau melalui beberapa pendekatan yaitu:

1. Pendekatan dari sisi obyek

Keuangan negara dari sisi obyek meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk seluruh kebijakan serta kegiatan baik dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara serta segala

sesuatu berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

2. Pendekatan dari sisi subyek

Keuangan negara dari sisi subyek yaitu meliputi seluruh pelaku yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dari sisi obyek, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan badan lainnya yang berkaitan langsung dengan keuangan negara.

3. Pendekatan dari sisi proses

Keuangan negara dari sisi proses yaitu meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang berkait dengan pengelolaan keuangan negara dari sisi obyek mulai dari perumusan kegiatan, pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

4. Pendekatan dari sisi tujuan

Keuangan negara dari sisi tujuan yaitu seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan/atau penguasaan keuangan negara dari sisi obyek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam pengelolaan keuangan negara setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah diberikan anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Menurut Purnomo, *et al* (2013) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Secara garis besar struktur APBN dibagi menjadi 5 yaitu:

1. Pendapatan Negara dan Hibah
2. Belanja Negara
3. Keseimbangan Primer
4. Surplus/Defisit Anggaran
5. Pembiayaan

2.1.6 Pengeluaran Kas Negara

2.1.6.1 Definisi Pengeluaran Kas Negara

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2013 Pengeluaran Negara adalah seluruh uang yang keluar dari kas negara. Sedangkan

definisi Kas Negara menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2013 adalah penyimpanan uang negara yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengeluaran kas negara adalah segala bentuk pengeluaran uang yang berasal dari kas negara untuk membayar seluruh pengeluaran negara.

2.1.6.2 Jenis Jenis Sistem Pengeluaran Kas Negara

Dalam penggunaannya pengeluaran kas negara memiliki mekanisme dan sistem terdiri dari 4 sistem (Pasuhuk, Kalangi, and Warongan 2018). Jenis jenis mekanisme dan sistem pengeluaran kas negara adalah sebagai berikut:

1. Uang Persediaan (UP)

Menurut Harjowiryo, *et al* (2018) “Uang Persediaan adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara. Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).” Uang Persediaan diberikan hanya untuk klasifikasi jenis belanja barang (52), belanja modal (53), dan belanja lain-lain (58). Pembayaran dengan uang persediaan yang dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. Dalam pemberian uang persediaan terdapat ketentuan sebagai berikut

- a. Diberikan kepada PA/KPA selaku pimpinan satker
- b. Diberikan untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari
- c. Merupakan uang muka yang harus dipertanggungjawabkan
- d. Bersifat revolving (dapat diganti/diisi kembali) jika telah digunakan minimal 50%
- e. Dikelola oleh bendahara pengeluaran dan dapat didistribusikan ke beberapa BPP atas PUM
- f. Dapat ditempatkan pada rekening pengeluaran pada bank

- g. Bendahara Pengeluaran harus melakukan pengujian terhadap setiap perintah bayar dari PA/KPA
- h. Sisa UP di akhir tahun anggaran harus di satori ke Rekening KUN.

2. Ganti Uang Persediaan (GUP)

Ganti uang persediaan (GUP) adalah penggantian uang persediaan yang telah digunakan oleh bendahara pengeluaran minimal 75% dari nilai uang persediaan (Tim BLUD *Syncore*, 2019). Pengajuan ganti uang persediaan dapat diajukan sesuai dengan besaran jumlah surat pertanggungjawaban (SPJ) atas pemakaian uang persediaan. surat pertanggungjawaban (SPJ) untuk penggantian uang persediaan dapat disampaikan dalam satu kegiatan atau beberapa kegiatan yang tidak dapat dibayarkan dengan mekanisme pembayaran langsung.

3. Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Tambahan uang persediaan adalah uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan yang melebihi pagu uang persediaan yang telah ditetapkan (Harjowiryo et al. 2018). Permintaan tambahan uang persediaan diajukan apabila dalam satu rangkaian kegiatan rencana penarikan dana uang persediaan yang sudah diajukan tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan tersebut, sepanjang belanja yang dimaksud tidak dapat dibayarkan menggunakan mekanisme langsung (LS).

4. Pembayaran Langsung (LS)

Menurut Ramli (2020) pembayaran langsung adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada penyedia barang/jasa atau penerima hak lainnya atas dasar perjanjian/kontrak atau surat perintah lainnya melalui surat perintah membayar langsung. Dalam mekanisme pembayaran langsung terdapat tahapan tahapan sebagai berikut:

- a. Pembayaran langsung (LS) diterbitkan melalui penerbitan surat perintah membayar (SPM) langsung (LS) sesuai alokasi dana dalam DIPA
- b. Pembayaran secara langsung (LS) meliputi pembayaran atas barang/jasa yang telah diterima ataupun sebelum barang/jasa diterima
- c. Pembayaran dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat pada perjanjian/kontrak

- d. Pembayaran langsung (LS) dilakukan melalui transfer dari kas negara ke rekening penyedia barang/jasa, pejabat/pegawai, atau pelaksana kegiatan lainnya pada kementerian negara/lembaga negara lainnya.

2.1.7 Pejabat Perbendaharaan Negara

2.1.7.1 Kuasa Pengguna Anggaran

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 08/PMK.02/2005 kuasa pengguna anggaran adalah pimpinan lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan anggaran menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2013 kuasa pengguna anggaran memiliki tugas dan wewenang seperti: menyusun DIPA, menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran, serta mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dengan bantuan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat penandatanganan surat perintah membayar (PPSPM).

2.1.7.2 Pejabat Pembuat Komitmen

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 08/PMK.02/2005 pejabat pembuat komitmen adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. Didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Pasal 13 dijelaskan bahwa dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang seperti: menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana, melaksanakan kegiatan swakelola serta perjanjian kontrak dengan pihak ketiga, menagih hasil dokumen pertanggungjawaban atas anggaran yang telah digunakan, serta menyerahkan hasil pekerjaan kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) dalam bentuk berita acara penyerahan.

2.1.7.3 Pejabat Penandatanganan SPM

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 08/PMK.02/2005 pejabat penandatanganan surat perintah membayar adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. Didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Pasal 17 dijelaskan bahwa pejabat penandatanganan surat perintah membayar memiliki tugas dan wewenang seperti: menerbitkan surat perintah membayar (SPM) yang telah diuji melalui dokumen pendukungnya, mencatat pagu realisasi belanja beserta sisa anggarannya, serta melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada kuasa pengguna anggaran (KPA).

2.1.7.4 Bendahara Pengeluaran

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 08/PMK.02/2005 bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga. Didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Pasal 24 dijelaskan bahwa bendahara pengeluaran memiliki tugas dan wewenang seperti: mengelola seluruh uang ataupun surat berharga yang berasal dari uang persediaan (UP) maupun yang bukan berasal dari uang persediaan (UP) yang bersumber dari APBN, mengelola transaksi dalam bentuk pembayaran langsung (LS), menyetorkan pemotongan kewajiban ke kas negara, membuat laporan pertanggungjawaban kepada KPPN.

2.1.8 Laporan Keuangan

2.1.8.1 Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah adalah laporan yang menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh satuan kerja instansi dalam satu periode pelaporan (Fitra, 2019). Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada para

pemangku kepentingan. Kawatu (2019) mengungkapkan bahwa terdapat dua alasan utama pemerintah perlu mempublikasikan laporan keuangannya yaitu:

1. Dari sisi internal

Alasan utama laporan keuangan pemerintah perlu dipublikasikan yaitu karena laporan keuangan dapat dijadikan sebagai alat kendali dari evaluasi kinerja secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban internal atas penggunaan anggaran kepada DPR.

2. Dari sisi eksternal

Laporan keuangan pemerintah digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban satuan kerja atau pemakai anggaran kepada para pihak eksternal yaitu: masyarakat, investor, pers, kreditor serta pihak-pihak lain yang berkepentingan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

2.1.8.2 Jenis Jenis Laporan Keuangan Pemerintah

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2019) laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing akan diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Didalam laporan realisasi anggaran terdapat informasi yang nantinya akan digunakan untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima dengan tujuan untuk mendanai program-program pemerintah baik pusat maupun daerah. Unsur-unsur yang terdapat didalam laporan realisasi anggaran yaitu:

- a. Pendapatan yaitu berupa penerimaan oleh bendahara yang dapat menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang akan menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja, yaitu seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara umum negara yang akan mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran.

- c. Transfer, yaitu berupa penerimaan ataupun pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain.
- d. Pembiayaan, yaitu seluruh penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih yang perlu dibayar atau diterim kembali.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih yaitu laporan yang menyajikan informasi adanya kenaikan ataupun penurunan saldo anggaran lebih pada tahun pelaporan yang akan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2019)

3. Neraca

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2019) menjelaskan bahwa neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu. Didalam suatu neraca terdapat beberapa unsur yaitu:

- a. Aset, merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah yang dapat diukur dalam satuan uang.
- b. Kewajiban yaitu utang yang timbul karena adanya pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pemerintah di masa lalu yang mengakibatkan pengorbanan atau penyelesaian dengan menggunakan sumber daya ekonomi di masa kini.
- c. Ekuitas yaitu seluruh kekayaan bersih pemerintah dari selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan kas baik itu penerimaan kas ataupun pengeluaran kas yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintahan selama periode tertentu (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2019).

5. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2019) laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi terkait adanya kenaikan atau penurunan ekuitas atau kekayaan pemerintah selama tahun periode dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

6. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang berbentuk penjelasan naratif yang merinci angka-angka yang tertera didalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas serta laporan perubahan ekuitas. Selain itu didalam catatan atas laporan keuangan terdapat informasi mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan, informasi lainnya yang dianjurkan serta ungkapan-ungkapan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

2.1.8.3 Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 laporan pertanggungjawaban adalah laporan yang dibuat bendahara atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas fungsional kebhendaharaan yang dijalankan, bendahara pengeluaran/penerimaan wajib melakukan penyusunan laporan pertanggungjawabannya (Setiawan and Muslim 2021). Bendahara wajib membukukan dan mempertanggungjawabkan seluruh transaksi dalam pelaksanaan anggaran satuan kerja. Salah satu tujuan dari adanya penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara yaitu menunjukkan keadaan kas dan realisasi anggaran sesungguhnya. Dengan begitu laporan pertanggungjawaban bendahara nantinya akan sangat berguna sebagai *managerial report* dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari bagi pimpinan.

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Didalam penelitian ini, yang dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan pencarian informasi dari penelitian-penelitian terdahulu (sebelumnya) yang memiliki topik yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Berikut ini penieiti menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu:

Peneltian Hasanah dan Sriyani (2021) dilakukan untuk menganalisis implementasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di masa pandemi covid 19 pada KPPN Palembang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pengumpulan data serta wawancara kepada pihak

terkait di KPPN Palembang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bendahara pengeluaran KPPN Palembang telah mengimplementasikan aplikasi SAKTI dengan baik dan tidak mencampurkan aplikasi SILABI yang sebelumnya digunakan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban bendahara. KPPN Palembang tahun 2019 telah beralih dari penggunaan SAKTI *Offline* menjadi SAKTI *Online* berbasis web. Dengan beralihnya SAKTI menjadi berbasis web Satuan Kerja tidak lagi perlu melakukan pembaruan secara manual. Pembaruan SAKTI berbasis web dilakukan oleh tim pusat dan akan otomatis terupdate ke dalam *website*. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pengimplementasian SAKTI di KPPN Palembang sudah berjalan dengan baik. Dengan adanya peralihan SAKTI *Offline* menjadi SAKTI *Online* dinilai lebih memudahkan bendahara pengeluaran KPPN Palembang karena dapat dengan mudah diakses melalui PC ataupun *Handphone*.

Penelitian yang dilakukan Amriani and Iskandar (2019) untuk menganalisis kesuksesan implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian *casual explanatory* dengan pendekatan kuantitatif. Dari penelitian yang dilakukan pengguna aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) memberikan penilaian yang positif terhadap kualitas SAKTI yang bersifat terintegrasi. Para pengguna aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dapat mengimplementasikan aplikasi SAKTI dengan baik. Aplikasi SAKTI dinilai dapat terintegrasi dengan baik, dapat diandalkan aman, mudah serta nyaman digunakan. Walaupun dalam penggunaan aplikasi SAKTI masih belum mampu mendorong kepuasan para pengguna di Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini yaitu penerapan sistem informasi berbasis aplikasi terintegrasi seperti aplikasi SAKTI memang dikatakan cukup membantu para penggunanya di Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Aplikasi SAKTI dinilai dapat melakukan upaya peningkatan secara menyeluruh dan berkelanjutan sehingga manfaat penggunaan aplikasi SAKTI di Satuan Kerja di Lingkungan

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dapat diperoleh secara maksimal.

Penelitian Nurddin, Sari, dan Mardiana (2021) dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan sistem teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Balai Latihan Kerja Kendari. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausalitas dengan pendekatan kuantitatif. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi di Balai Latihan Kerja Kendari yaitu Sistem Aplikasi Satker (SAS). Pemanfaatan aplikasi SAS yang dijalankan oleh Balai Latihan Kerja Kendari secara keseluruhan dilakukan dengan baik dalam upaya menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Dalam memenuhi tujuan serta visi dan misi di Balai Latihan Kerja Kendari aplikasi SAS dapat membantu penyusunan laporan keuangan secara lebih tepat, cepat, dan berkualitas. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Sistem teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam penelitian ini Balai Latihan Kerja Kendari telah mampu menerapkan serta memanfaatkan teknologi informasi secara tepat dan maksimal. Sehingga, pengelolaan keuangan dan penggunaan sistem informasi berupa aplikasi SAS berdampak pada kemudahan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan laporan keuangan di Balai Latihan Kerja Kendari.

Penelitian Armin (2018) yang dilakukan untuk menganalisis siklus pengeluaran uang persediaan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Palembang. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Palembang, masih memiliki kesalahan administrasi yang tidak dapat dihindari serta adanya keterlambatan pengajuan uang persediaan. Pelaksanaan kegiatan operasional kantor juga sedikit terlambat dikarenakan adanya proses yang tidak sebentar dalam pengeluaran dana APBN seperti uang persediaan. Walaupun kesalahan tersebut hanya bersifat administrasi dan tidak menimbulkan kerugian negara. Akan tetapi, hal tersebut akan menjadi penilaian terhadap pengelolaan anggaran di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Palembang. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan uang persediaan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B

Palembang belum berjalan dengan maksimal dikarekan masih adanya kesalahan-kesalahan serta keterlambatan dalam pengelolaan uang persediaan.

Penelitian Yunita, Sugianto, and Kusmilawaty (2019) dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akurual sebagai implementasi PP 71/2010 dalam penyusunan laporan keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akurual sebagai implementasi PP 71/2010 dalam penyusunan laporan keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang sudah sesuai. Meskipun didalam penelitian ini ditemukan adanya beberapa komponen laporan keuangan yang tidak sesuai dalam PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan keuangan yang tidak ditemukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih. Akan tetapi hal tersebut dikarenakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu instansi bukan layanan umum (BLU) yang tidak memiliki pendapatan dan kas.

Penelitian yang dilakukan oleh Waweru dan Ngaba (2019) bertujuan untuk menganalisis sistem informasi manajemen keuangan terintegrasi dalam Kementerian Pemerintah terpilih di Kenya. Pengembangan sistem informasi manajemen dan keuangan di Pemerintahan Kenya disebut dengan *Enterprise Resource Planning (ERP)* berbasis *Oracle*. Dalam penggunaan sistem informasi manajemen keuangan terintegrasi di Pemerintahan Kenya dinilai dapat meningkatkan sistem pencatatan data keuangan, pelacakan serta manajemen informasi. Penggunaan sistem informasi manajemen keuangan terintegrasi di Pemerintahan Kenya dapat menjawab tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara. Sistem ini juga dapat meningkatkan kemampuan pelaporan dalam mendukung perencanaan anggaran dan membuat proses pengadaan secara otomatis. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu penggunaan sistem informasi manajemen keuangan terintegrasi di Pemerintahan Kenya menunjukkan peningkatan dalam proses transaksi akuntansi dan mengkonsolidasikan proses keuangan secara *real time*.

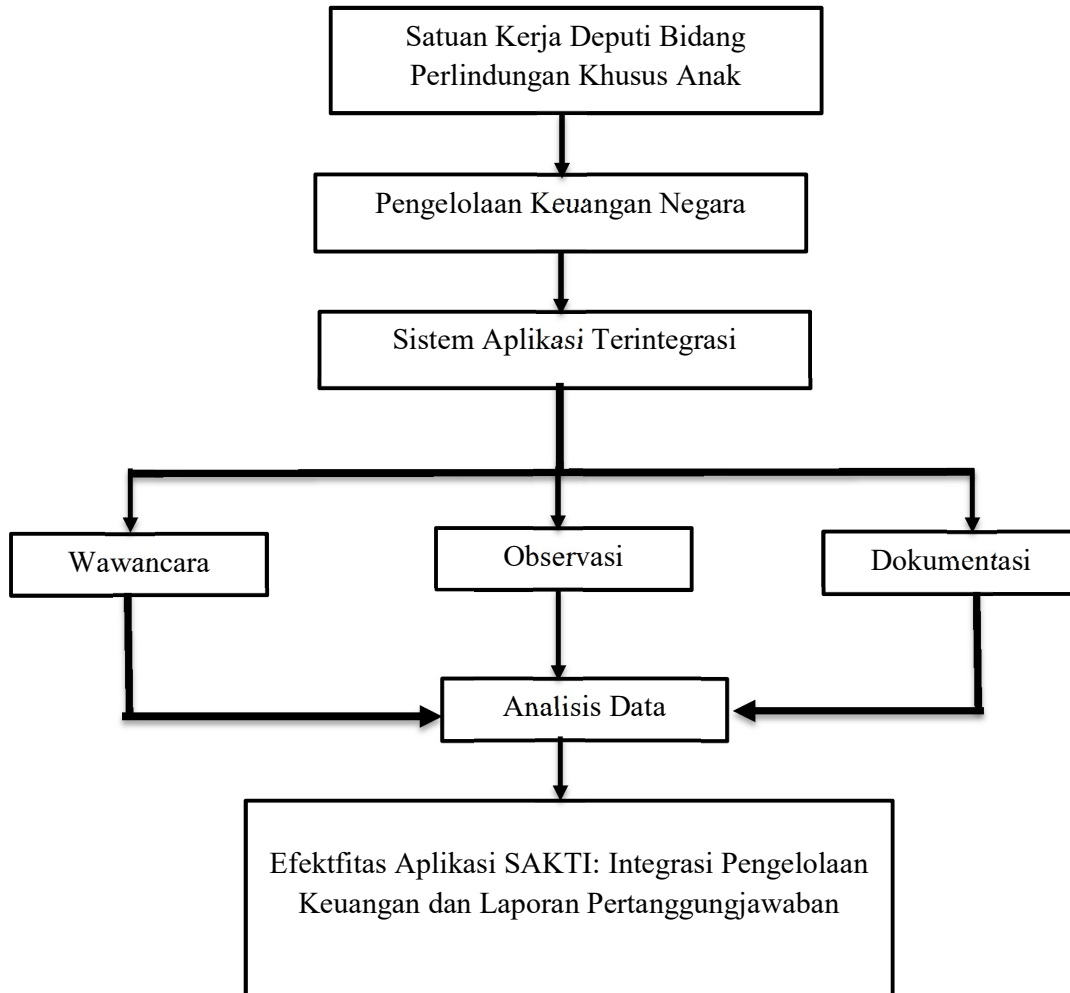
Penelitian Mbaka and Namada (2019) dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh sistem informasi manajemen dan keuangan terintegrasi terhadap efektivitas rantai pasokan di Kabupaten Kirinyaga. Sejak tahun 2014 pemerintahan pusat di Kenya telah meluncurkan sistem informasi manajemen keuangan terintegrasi ke kabupaten, hal ini dimaksud dengan tujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi di tingkat kabupaten. Dalam penelitian ini digunakan penelitian jenis kuantitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini sistem informasi keuangan terintegrasi yang digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Kabupaten digunakan dapat memfasilitasi pengadaan, pembayaran serta komunikasi yang baik dengan para pemasok. Selain itu, dengan adanya sistem informasi manajemen keuangan terintegrasi yang di fokusnya untuk *E Purchasing* dinilai efektif karena adanya kemudahan proses pengadaan serta penghematan waktu dalam transaksi. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini yaitu dengan penggunaan sistem informasi manajemen keuangan terintegrasi di Kabupaten Kirinyaga dikatakan cukup efektif karena para pengguna dapat menyimpan data yang besar dalam bentuk *softfile* serta mempermudah para pengguna dalam melakukan transaksi *E purchasing*.

Menurut Michael, Oyewale, dan Oladosu (2017) dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem keuangan terintegrasi pada kinerja sektor public di Nigeria. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Pemerintah Nigeria memutuskan untuk menggunakan sistem keuangan terintegrasi dengan tujuan menggunakan sistem penganggaran dan sistem akuntansi berbasis teknologi informasi guna membantu pemerintah dalam merencanakan, membelanjakan, mengelola, serta melaporkan anggaran mereka kepada publik secara lebih efisien dan efektif. Hasil penelitian menunjukkan dengan adanya sistem keuangan terintegrasi yang digunakan dapat meningkatkan kinerja sektor publik di Nigeria. Dalam penelitian ini juga disimpulkan bahwa hubungan antara sistem keuangan terintegrasi dengan keuangan publik dinilai sangat efektif. Sistem keuangan terintegrasi telah mempengaruhi pengelolaan keuangan publik di Nigeria sehingga seluruh pelaporan, pengendalian serta proyek-proyek pemerintah dapat berjalan dengan efektif dan tepat waktu.

2.3 Kerangka Konsptual Penelitian

. Seiring dengan semakin canggihnya teknologi informasi yang ada dan terus berkembang, pemerintah sebagai salah satu pemeran dalam pertumbuhan ekonomi juga turut serta dalam mendukung adanya perkembangan teknologi informasi salah satunya yaitu dengan penggunaan sistem informasi akuntansi terintegrasi. Sistem informasi akuntansi terintegrasi yang digunakan pemerintah sebagai salah satu wujud penerapan *e Government* dalam bidang keuangan yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan salah satu bentuk perubahan di sektor pemerintahan dengan penggunaan *database* terintegrasi. Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah bentuk penggabungan beberapa aplikasi keuangan yang tidak hanya digunakan dalam proses pengelolaan keuangan negara saja melainkan digunakan dalam proses pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban bendahara dalam pemakaian anggaran.

Untuk dapat mempermudah peneliti dalam menganalisis efektivitas penggunaan sistem aplikasi terintegrasi dalam pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, maka peneliti akan menggunakan kerangka konseptual yang dapat membantu peneliti dalam menemukan jawaban rumusan masalah penelitian. Kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Analisis Efektivitas Aplikasi SAKTI: Integrasi Pengelolaan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban